

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON IV/
FUNGSIONAL DISETARAKAN**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irwanda Pulungan, S.Sos
Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suwito, SE
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

SUWITO, SE
PEMBINA
NIP. 19720319 199602 1 005

Medan, 2023
Pihak Pertama,
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH

IRWANDA PULUNGAN, S.Sos
PENATA TK. I
NIP. 19680513 199007 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Menyusun Laporan yang tersedia terkait pelaporan keuangan baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	18 Laporan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BPKAD Provsu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Memverifikasi dokumen pengesahan SPP yang terverifikasi tercapai sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan	3000 Dokumen
3	Tersedianya Penyusunan SPM dan Dokumen Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan lainnya serta SPP-LS Pengadaan Barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	Jumlah SPM dan Dokumen yang diteliti kelengkapannya terkait SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya dan SPP-LS Pengadaan Barang dan jasa	130 Dokumen
4	Terlaksananya Kegiatan Pengarsipan Dokumen Keuangan	Menyusun dokumen berupa laporan keuangan untuk diarsipkan	12 Bulan
5	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN BKAD Provsu	26 Dokumen
6	Terlaksananya Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPKAD	Tersedianya Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan BPKAD	3 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 18.693.600.446
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 91.574.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 1.296.240.000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 4.900.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 6.300.000
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 5.400.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 180.000.000
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 5.400.000
	Jumlah	Rp. 30.283.434.446

Pihak Kedua
SEKRETARIS



SUWITO, SE
 PEMBINA
 NIP. 19720319 199602 1 005

Medan,
 Pihak Pertama
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH



IRWANA PULUNGAN, S.Sos
 PENATA TK. I
 NIP. 19680513 199007 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
Jabatan : Perencana Ahli Muda Disetarakan pada Sekretaris

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : S U W I T O, SE
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Selama masa pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

S U W I T O, SE
PEMBINA
NIP. 19720319 199602 1 005

Pihak Kesatu,

PERENCANA AHLI MUDA

H HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
PENYUSUN
NIP. 19690817 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANAAN AHLI MUDA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan BPKAD	1 Tersedianya konsep Renja/Perubahan Renja	2 Dokumen
		2 Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV dan Staf	1 Dokumen
		3 Tersedianya RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	4 Dokumen
		4 Tersedianya dokumen Renstra	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1 Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen
		2 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan	4 Dokumen
		3 Tersedianya dokumen SPIP, Reformasi Birokrasi, SAKIP, Laporan Kinerja (LK), Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Zona Integritas, Pelayanan Publik dan	1 Dokumen
3	Terlaksananya Informasi dan Dokumentasi dan Publikasi kinerja BPKAD	1 Tersedianya Informasi dan dokumentasi publikasi kinerja BPKAD	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 123.100.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.000.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 5.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 10.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5.000.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.628.000,00
J U M L A H		RP. 202.728.000,00

Pihak Kedua,

SEKRETARIS



S U W I T O, SE
 PEMBINA
 NIP. 19720319 199602 1 005

Medan, 2023

Pihak Pertama,

PERENCANA AHLI MUDA



H HENRI AIR BLAN, SE, M Si
 PEMBINA
 NIP. 19690817 199002 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Faizal, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahmad Syafei, SE
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH


AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH I


MUHAMMAD FAISAL, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800529 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 1 Tahun

3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen - 4 Bulan
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan - 12 Bulan

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	153.094.500,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	181.519.125,00
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	55.000.000,00
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	115.000.000,00
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	60.000.000,00
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	110.000.000,00
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	500.000.000,00
8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	710.000.000,00
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	15.000.000,00
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	75.000.000,00
11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	15.000.000,00
12.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.704.535.636.573,00
13.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50.000.000,00
14.	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00
15.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	550.000.000,00
Jumlah		2.707.225.250.198,00

Medan,

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH


AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

Pihak Pertama,

KASUBBID PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH I


MUHAMMAD FAISAL, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800529 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Abdul Syukur Tambunan
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahmad Syafei, SE
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH


AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH II


Drs. ABDUL SYUKUR TAMBUNAN
PENATA TINGKAT I
NIP. 19670326 198611 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 1 Tahun

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen – 4 Bulan
- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan – 12 Bulan

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	155.000.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	140.000.000,00
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	50.000.000,00
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100.000.000,00
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45.000.000,00
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100.000.000,00
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	470.000.000,00
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	570.000.000,00
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	13.000.000,00
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	54.000.000,00
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	14.000.000,00
12. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	50.000.000,00
13. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50.000.000,00
14. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	100.000.000,00
15. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	400.000.000,00
Jumlah	2.411.000.000,00

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH



AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH II



Drs. ABUL SYUKUR TAMBUNAN
PENATA TINGKAT I
NIP. 19670326 198511 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2023
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra. Nur Ina Rahayu Nasution, MSP
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ahmad Syafei, SE
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

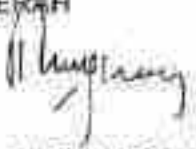
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH


AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

Medan,

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH


Dra. NUR INA RAHAYU NASUTION, MSP
PEMBINA
NIP. 19690115 199503 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tertaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tertaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 1 Tahun

3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen - 4 Bulan
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tertaksananya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan - 12 Bulan

Kegiatan

Anggaran (Rp)

1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	115.000.000,00
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	100.000.000,00
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	40.684.000,00
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	92.635.025,00
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34.628.000,00
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	88.977.896,00
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	454.989.125,00
8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	620.981.475,00
9.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12.427.200,00
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	40.185.625,00
11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12.092.500,00
12.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	34.686.800,00
13.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	342.117.725.500,00
14.	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	71.746.100,00
15.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	352.966.575,00
Jumlah		344.189.705.821,00

Pihak Kedua,

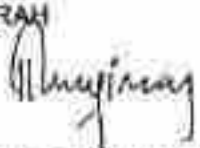
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH


AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

Medan,

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH


Dra. NUR INA RAHAYU NASUTION, MSP
PEMBINA
NIP. 19690115 199503 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febri Muliansyah, S.Sos
Jabatan : Kasubbid Perbendaharaan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Halimatussa'diah, SE, M.AP
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perbendaharaan


Halimatussa'diah, SE, M.AP
Pembina TK I
NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,
Pihak Pertama
Kasubbid Perbendaharaan I


Febri Muliansyah, S.Sos
Penata
NIP. 198102262006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terciptanya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	49 Dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6 Dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya laporan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN	14 Laporan
4	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen
5	Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Laporan Realisasi SP2D	1 Dokumen

KEGIATAN**ANGGARAN**

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Rp. 559.738.600,- |
| 2 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Rp. 33.037.200,- |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Rp. 592.860.600,- |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Rp. 30.339.900,- |
| 5 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait | Rp. 992.150.335,- |

JUMLAH**Rp. 2.208.126.635,-**

Pihak Kedua,
Kabid Perbendaharaan



Halima Ussa'diah, SE. M.AP
Pembina
NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,
Pihak Pertama,
Kasubbid Perbendaharaan I



Febri Muliawati, S.Sos
Penata TK I
NIP. 19810226 200604 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Huddin Sani Pane, S.Sos

Jabatan : Kasubbid Perbendaharaan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Halimatussa'diah, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

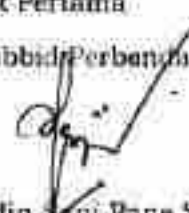
Kepala Bidang Perbendaharaan


Halimatussa'diah, SE, M.AP
Pembina TK I
NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,

Pihak Pertama

Kasubbid Perbendaharaan II


Huddin Sani Pane, S.Sos
Penata TK I
NIP. 197105161991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUB BIDANG PERBENDAHARAAN II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen
2	Terselenggaranya Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


- | | |
|---|---------------------|
| 1. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait. | Rp. 1.683.815.128,- |
| 2. Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya | Rp. 465.695.000,- |

JUMLAH

Rp. 2.149.510.128

Pihak Kedua,
Kabid Perbendaharaan

Medan,
Pihak Pertama,
Kasubbid Perbendaharaan II


Halimotulhudaiah, SE, MAP
Pembina TK I
NIP. 196605011990072001


Huddin Sani Pane, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197105161991031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusril Ridwan,SH,MM
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Halimatussa'diah,SE,M.AP
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perbendaharaan


Halimatussa'diah,SE,M.AP
Pembina TK I
NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,
Pihak Pertama
Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Ahli Muda


Yusril Ridwan,SH,MM
Pembina
NIP. 19680409 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**

NO 1	SASARAN 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Tersedianya regulasi atas penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	4 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

- 1 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan. Rp. 467.132.400,-

JUMLAH

Rp. 467.132.400,-

Pihak Kedua,
Kabid Perbendaharaan



Halima Sa'diah, SE. M.AP
Pembina TK I
NIP. 19660501 199007 2 001

Medan,
Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat
Dan Daerah Ahli Muda



Yusri Ridwan, SH, MM
Pembina
NIP. 19680409 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2023 & Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2023	Tepat Waktu
		Meningkatnya Kualitas SDM yang berkompeten di Bidang Pengelolaan Keuangan	100%

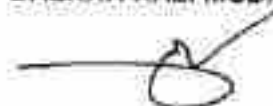
NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 783.369.800,00
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 361.494.120,00
-	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Rp 152.642.000,00
	Total Anggaran	Rp 1.297.505.920,00

Medan, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA**


**RATNA SARI PINEM, SE, M.M
PEMBINA
NIP. 19671029 196710 2 001**


**SUHAIMI INDRA GUNAWAN, SE, M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770618 200904 1 002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI II BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novita L. Simalupang, SE, M Si, Ak
Jabatan : Kepala Subbidang Akuntansi II Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Provsu
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ratna Sari Pinem, SE, M M
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Provsu
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**


RATNA SARI PINEM, SE, M.M
PEMBINA
NIP. 19671029 198710 2 001

Medan, 2023
**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI II**


NOVITA L. SIMATUPANG, SE, M.SI, AK.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19781103 200902 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI II BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu	WTP
		Meningkatnya ketelitian dan Akurasi Pencatatan data Pelaporan Keuangan	100%

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban	Rp 447.453.300,00
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Rp 740.457.000,00
	Total Anggaran	Rp 1.187.910.300,00

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**


**RATNA SARI PINEM, SE, M.M
PEMBINA
NIP. 19671029 198710 2 001**

Medan, 2023
**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI II**


**NOVITA L. SIMATUPANG, SE, M.SI, Ak.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19781103 200902 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI I BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Tepat Waktu
		Terselenggaranya koordinasi sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	WTP

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 313.781.250,00
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 646.033.000,00
	- Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 492.378.317,00
	Total Anggaran	Rp 1.454.192.567,00

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**


**RATNA SARI PINEM, SE, M.M
PEMBINA
NIP. 19671029 198710 2 001**

**Medan, 2023
PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI I**


**ELYANI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19670215 199503 2 001**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUAIDI HARAHAP, ST
Jabatan : KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN BMD
BKAD PROVSU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. DIAH ANANDA
Jabatan : KEPALA BIDANG BIDANG PENGELOAAN BMD BKAD PROVSU

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN BMD**

Dra. DIAH ANANDA
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670724 198603 2 001

**PIHAK PERTAMA,
KASUBBID PENGAMANAN DAN
PEMINDAHTANGANAN BMD**

SUAIDI HARAHAP, ST
PRMATA Tk. I
NIP. 19811122 201001 1 022

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DAN PENDINGKATAN RUMAH SAKIT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertindakannya Analisis, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kesesuaian dalam Mengelola, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2. Kegiatan
2	Tertindakannya Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meringkaskannya Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.1. Laporan
3	Tertindakannya koordinasi pengkajian konsultasi Peralihan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	Berikutnya dalam koordinasi, pengkajian dan konsultasi Peralihan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	4.2. Laporan

Kategori	Jumlah
1. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 348.678.800
2. Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 1.759.718.500
3. Peralihan Barang Milik Daerah	Rp. 765.123.600

Jumlah **Rp. 2.873.520.900**

Medan, 2023

PIRAK SEKONDA :

KEPALA BIDANG PENGELUARAN
 BMD


 Dra. HANI ANANDA,
 PEMBINA Tk. 1
 NIP. 19670724 198603 2-01

PIRAK PERTAMA :

KASUBBID PENGAMANAN DAN
 PENDINGKATAN RUMAH SAKIT


 HANI ANANDA, ST
 PEMBINA Tk. 1
 NIP. 19811022 201001 1-022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN BMD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFIK AZHAR, ST, MM

Jabatan : KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PEMBINAAN BMD BKAD
PROVSU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra. DIAHANANDA

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BMD BKAD PROVSU

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BMD

Dra. DIAHANANDA, SE
PENATA Tk I
NIP. 19670724 198603 2 001

PIHAK PERTAMA,

KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN
PEMBINAAN BMD

TAUFIK AZHAR, ST, MM
PENATA
NIP. 19811228 201410 1 003

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN HMD
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya inventarisasi terhadap data Barang Milik Daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42 SKPD
2	Terlaksananya pengawasan/pembinaan/monitoring/evaluasi teknis terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	Jumlah sosialisasi/kemungkinan teknis peningkatan sumber daya manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah serta melakukan pembinaan terhadap Pengelola Barang Milik Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	33 Kab/Kota
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah serta pelaksanaan/pembinaan mutasi lanjut hasil pemerkasaan BPK RI terhadap temuan terkait Barang Milik Daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data pemetaan pengalihan barang/jasa tahun berjalan, kepraktisan, penyusutan, mutasi tambah kurang, hasil inventarisasi serta tidak serta pemerkasaan tidak lanjut hasil pemerkasaan BPK RI pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3024 Data
4	Terlaksananya sosialisasi/kemungkinan teknis/caching/CIHR terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah kepada Aparatur Pengelola Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Barang Milik Daerah pada SKPD Pengawasan	Jumlah sosialisasi/kemungkinan teknis/caching class peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemantauan/pembinaan dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah Pengawasan	2 Kab
5	Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pergerakan Semester I dan Semester II Tahun 2022	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II dalam rangka pembinaan/pemantauan/ evaluasi dan verifikasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42 SKPD
6	Terlaksananya rekonsiliasi data aset tetap dan barang persediaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data mutasi berupa modal atau barang/jasa, mutasi tambah kurang, penghapusan hasil aset tetap dan barang persediaan pada SKPD di lingkungan Pengawasan	3024 Data
7	Adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1 Regulasi

Revisi

Revisi

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.	754.610.000
2. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	327.050.000
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.	1.131.370.520
4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	125.240.000
5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp.	549.907.000
6. Rekonsiliasi dalam rangka Pemantauan Laporan Barang Milik Daerah	Rp.	303.570.000
7. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	102.070.000
JUMLAH	Rp.	2.790.247.020

PIBAK KEDUA :

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN HMD



DINA ARABELA
PENATA Tk. I
NIP. 19670724 1980012 000

Ketua

2023

PIBAK PERTAMA :

KASUBID PENATAUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN HMD



TAIRIC AHMAD ST. MMR
PENATA
NIP. 19811228 2012011 000



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PADA SUBBID ANALISA KEBUTUHAN
DAN PEMANFAATAN ASET BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Zuriana, SE, MM
Jabatan : Fungsional Penilai Pemerintah Pada Subbidang Analisa Kebutuhan Dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Pengelolaan BMD BKAD Provinsi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Dish Ananda
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Provinsi
Selaku atasan Pihak Pertama. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BKAD Provinsi Sumatera Utara

Dra. Dish Ananda
Pembina Tk. I
NIP. 19670724 198803 2 001

Pihak Pertama
Fungsional Penilai Pemerintah Pada Subbidang
Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BKAD Provinsi Sumatera Utara

Eka Zuriana, SE, MM
Pembina
NIP. 19960611 199703 2 002



PERJANJIAN KINERJA

FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH PADA SUBBID ANALISA KEBUTUHAN & PEMANFAATAN ASET
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tertaksananya Pengendalian dan Pembinaan untuk mengendalikan Penyusunan SSH berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam Tim Penyusunan SSH.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Standar Situasi Harga pada Aplikasi E-SSH di Lingkungan Pemprov.	100 %
		Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Penyusunan SSH	
2.	Tertaksananya Pengendalian dan Pembinaan untuk mengendalikan Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam Tim Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.	Dokumen tentang spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dalam perencanaan.	42 SKPD
		Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.	
3.	Tertaksananya Pengendalian dan Pembinaan untuk mengendalikan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam Tim Penyusunan RKBMD	Buku Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	42 SKPD
		Surat Persetujuan Gubernur tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Tahun Anggaran 2023.	
4.	Tertaksananya Pengendalian dan Pembinaan untuk pemantauan dan penilaian terhadap Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan BMD berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian terhadap usulan atas Penggunaan dan pemanfaatan BMD.	Surat Persetujuan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah TA. 2023.	42 SKPD
		Jumlah Dokumen laporan hasil Penetapan SK Gubsu/ Sekdaprovu tentang persetujuan penetapan dan pemanfaatan BMD SK Tim dalam rangka Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan BMD.	

No	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	Penyusunan Standar Harga	Rp. 702.051.750,00
2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Rp. 385.850.118,00
3.	Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Rp. 145.455.600,00
4.	Optimalisasi Penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Rp. 458.179.750,00
Jumlah		Rp. 1.691.536.618,00

Medan,

2023

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BKAD Provinsi Sumatera Utara

Pihak Pertama
Fungsional Penilai Pemerintah Pada Subbidang
Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BKAD Provinsi Sumatera Utara



Dra. Diah Ananda
Pembina Tk I
NIP. 19670724 198603 2 001

Eka Zurana, SE, MM
Pembina
NIP. 19680611 199703 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2023
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novanty, SE, MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Keuangan I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : Drs. Hendra Yudi, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

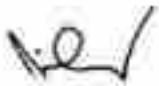
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818 199401 1 002

Medan,
Pihak Pertama,
KASUBBID BINA KEUANGAN I


NOVANTY, SE, MM
PENATA
NIP. 19751104 200604 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN I
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Ranperdis tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring penyempurnaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dan 11 kab./kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring penyempurnaan Perubahan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dan 11 kab./kota • 44 dokumen LRA dari 11 Kab/Kota • 150 Dokumen data dan 11 Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 11 kab./kota


		<p>Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota • Tersedianya rekapitulasi data LRA 	
	- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselesainya masalah di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan keuangan	11 Kab/Kota dalam 1 tahun anggaran
	- Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Tertaksananya rapat koordinasi dan rapat teknis terkait pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Sumut	2 kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran

Sub Kegiatan

	<u>Anggaran</u>
1. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Rp 139.000.000,00
2. Evaluasi Ranperda APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp 235.500.000,00
3. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp 108.000.000,00
4. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 127.400.000,00
5. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Rp 61.775.000,00
Jumlah.....	Rp 671.675.000,00


Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BKAD PROVSU


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818 199401 1 002

**Medan,
Pihak Pertama,**

KEPALA SUB BIDANG
BINA KEUANGAN I
BKAD PROVSU


NOVANTY, SE, MM
PENATA
NIP. 19751104 200604 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2023
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yafizham Parinduri, S.Sos, M.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Keuangan II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Hendra Yudi, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


**KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670816 199401 1 002

Medan,

Pihak Pertama,

KASUBBID BINA KEUANGAN II


YAFIZHAM PARINDURI, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19730821 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG BINA KEUANGAN II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	- Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab/Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring penyempurnaan APBD Kab/Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekam data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 11 kab./kota
	- Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab/Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring penyempurnaan Perubahan APBD Kab/Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekam data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 11 kab./kota • 44 dokumen LRA dari 11 Kab/Kota • 150 Dokumen data dari 11 Kabupaten/Kota
	- Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 11 kab./kota


		<p>Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota • Tersedianya rekapitulasi data LRA 	
	- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselesainya masalah di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan keuangan	11 Kab./Kota dalam 1 tahun anggaran
	- Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan rapat teknis terkait pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Sumut	2 kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran

Sub Kegiatan

	Anggaran
1. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Rp 139.000.000,00
2. Evaluasi Ranperda APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp 235.014.040,00
3. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp 108.000.000,00
4. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 127.400.000,00
5. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Rp 62.325.000,00
Jumlah.....	Rp 671.469.040,00

Pihak Kedua,


**KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BKAD PROVSU**


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818-199401 1 002

Medan,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BIDANG
BINA KEUANGAN II
BKAD PROVSU**


YAFIZHAM PARINDURI, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19730821-199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2023
FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Fachrizal Syahputra Lukman, SE
Jabatan : Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

- Nama : Drs. Hendra Yudi, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818 199401 1 002

Medan,
Pihak Pertama,
FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH

FACHRIZAL SYAHPUTRA LUKMAN, SE
PEMBINA
NIP. 19700102 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring penyempurnaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 11 kab./kota
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik • Terlaksananya monitoring penyempurnaan Perubahan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dan 11 kab./kota • 44 dokumen LRA dan 11 Kab/Kota • 150 Dokumen data dan 11 Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dan 11 kab./kota

		<p>Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan provinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertaksananya monitoring penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekam data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah kab./kota • Tersedianya rekapitulasi data LRA 	
	- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terselesainya masalah di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan keuangan	11 Kab/Kota dalam 1 tahun anggaran
	- Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan rapat teknis terkait pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Sumut	2 kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran

Sub Kegiatan

	<u>Anggaran</u>
1. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Rp 139.000.000,00
2. Evaluasi Ranperda APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp 235.500.000,00
3. Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp 108.106.000,00
4. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 127.058.000,00
5. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	Rp 61.833.200,00
Jumlah.....	Rp 671.498.200,00

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
BKAD PROVSU



Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670616 199401 1 002

Medan,
Pihak Pertama,

FUNGSIONAL ANALISIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH
BKAD PROVSU



FACHRIZAL SYAHPUTRA LUKMAN, SE
PEMBINA
NIP. 19700102 199203 1 012